

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Partai politik adalah pilar demokrasi yang berakar dari legitimasi sosial masyarakat setempat menurut Budiatri (2015). Sebagai sarana demokrasi yang dapat menghubungkan warga negara dengan pemerintah merupakan tugas pokok partai politik. Schattschneider (dalam Hanafi, 2018, hal:198) berpendapat demokrasi modern tidak bisa dibayangkan tanpa partai politik. Maka dari itu partai politik harus menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat yang baik.

Sedangkan pengertian partai politik menurut Robert (dalam Hanafi, 2018, hal:198) adalah kelompok mandiri dari masyarakat yang mempunyai target, mengikuti pencalonan dan bertarung di pemilihan umum, dengan impian mendapat kontrol atas kekuasaan pemerintahan dengan menguasai jabatan publik dan organisasi pemerintah.

Adanya partai politik dan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan untuk mendapatkan control atas kekuasaan pemerintah. Keberadaan partai politik semakin penting karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah dan menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi menentukan kebijakan publik dan pemimpin (Efriza, 2019) (Efriza, 2019).

Partai politik juga untuk menyalurkan *collective will* mempresentasikan kepentingan berbagai kelompok dan masyarakat. Begitu pentingnya partai politik, sehingga diasumsikan bahwa tak ada demokrasi tanpa partai politik. Hal ini didasari oleh fakta bahwa institusi partai politik adalah salah satu pilar penting bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, yudikatif, legislatif, eksekutif dan lembaga pers yang bebas. Semua proses politik berperan sangat sentral dalam demokrasi Indonesia. Seperti dari pemilihan calon legislatif, Kepala Daerah, Presiden, jabatan lain seperti di KPU, hingga jabatan di penegak hukum melibatkan partai politik (Efriza, 2019).

Selain peran penting yang dimiliki, menurut Efriza (2019) fungsi partai politik dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi utama. Keempat fungsi utama tersebut yakni: artikulasi dan agregasi kepentingan, pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen. Antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya memiliki keterkaitan, dan memiliki pengaruh besar terhadap ekspektasi dan animo anggota maupun masyarakat umum terhadap suatu partai politik.

Namun saat ini hal yang terjadi, partai politik pasca pemilu telah menunjukkan terjadinya pragmatisme politik yang ditandai dengan krisis identitas, dan kaburnya ideologi partai-partai politik di Indonesia. Dinamika ini membuat arah perjuangan partai tidak jelas dan sulit membedakan partai satu dengan yang lainnya (Mayrudin, 2017).

Dalam kondisi yang terjadi seperti ini, partai politik menjadi sangat pragmatis, dikarenakan tidak lagi melibatkan masalah ideologis menurut Macridism (dalam Mayrudin, 2017, hal:164). Senada dengan hasil temuan Mayrudin (2017), partai politik sebagai lembaga intermediari mengalami pergeseran *positioning* ideologi. Mayrudin (2017) menemukan tiga bentuk pembilahan partai-partai politik saat menghadapi pemilu 2014, dengan melihat jarak ideologis dan *positioning* ideologi-nya, yaitu “kiri” (Nasionalis Sekuler), “kanan” (Islam) dan “Tengah” (*Cacht-All Party*). Pergeseran *positioning* ideologi memiliki 3 pola. Pertama, konservatif yang mempertahankan status quo partainya sebagai partai ideologis. Kedua, konservatif progresif melakukan pergeseran, namun tidak begitu ekstrem, masih terhitung moderat. Ketiga, pola ekstrimis, dimana partai melakukan pergeseran *positioning* ideology begitu tajam.

Selain masalah mengenai buramnya arah perjuangan, partai politik juga memiliki masalah dari sisi kepemimpinan, misalnya, dalam 10 tahun terakhir, tidak ada regenerasi dalam partai politik di tanah air. Hal ini merupakan indikator kemunduran demokrasi di partai politik. Dimensi lain adalah nominasi pencalonan untuk pemilihan legislatif, Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah, yang masih belum menegakkan prinsip seperti yang diundangkan oleh undang-undang pemilu (<https://nasional.tempo.co/read/1038266/banyak-kasus-suap-di-daerah-icw-problem-ada-di-partai>).

Masalah lain yang melekat pada Partai politik juga seperti kasus suap, korupsi, dan penyelewengan kekuasaan yang masih sering pasca orde baru, ternyata mengikutsertakan semua partai politik dan para elite pimpinan partai politik, baik di pemerintahan eksekutif maupun lembaga legislatif, di tingkat pusat bahkan daerah. Terkait kenyataan tersebut, kritik dan tuntutan masyarakat juga ditujukan terhadap komitmen dan visi partai politik mengenai arah penataan Indonesia ke depan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan pertahanan keamanan (<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/467294/partai-politik-di-indonesia-lemah-dan-terperangkap-oligarki>).

Dari kenyataan terburuk tersebut, tentu akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hasil segi Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 25-31 januari 2021. Menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Menurut hasil survei, sebanyak 71% responden memilih percaya kepada DPR dan 65 persen memilih percaya kepada partai politik. Sejalan dengan hasil survei indikator politik Indonesia periode 1-3 februari 2021. Tingkat kepercayaan kepada parpol juga berada di urutan buncit sebesar 47%, kemudian DPR dengan 52% (<https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit>).

Dari permasalahan diatas, membuat banyak organisasi yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik, terutama pada pemilu tahun

2019. Kehadiran partai baru bisa didorong oleh ketidakpuasan terhadap mekanisme tradisional partai yang lama, birokratisasi mereka dan ketidakpercayaan pada pemimpin partai, hal ini bisa mendorong sebagian warga yang aktif, muda dan berpendidikan mencari lokus yang berbeda untuk mengekspresikan partisipasi. Maka partai baru dalam hal ini bisa membangun interaksi dengan basis-basis pemilih (Hanafi, 2018).

Di Indonesia kemunculan partai-partai baru selain juga dilatari dengan pluralistik dan majemuk masyarakatnya, menurut Marijan (dalam Hanafi, 2018, hal:201), juga karena didorong pertama, demokrasi merupakan kondisi yang masih berproses. Sistem pemilu, sistem kepartaian di Indonesia masih belum sepenuhnya baku dan masih mencari bentuk ideal. Kedua, belum adanya aturan yang ketat dalam pemilu *electoral rules*, mengenai masuknya partai baru dalam pemilu, seperti aturan bagi partai partai yang tidak lolos *threshold* atau ambang batas parlemen dan kemudian berubah wajah menjadi partai baru untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Ketiga, suara pemilih belum kuat dengan partai-partai yang sudah ada, sehingga masih memungkinkan pemilih untuk berpindah dan menemukan partai yang dianggap merepresentasi kepentingan pemilih.

Untuk Pemilu 2019, KPU telah menetapkan partai politik peserta pemilu yang berjumlah 16 partai politik. Dari jumlah partai politik peserta tersebut terdapat 4 wajah pendatang baru, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai

Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

(<https://nasional.tempo.co/read/1062006/empat-partai-baru-di-pemilu-2019-dan-kekuatan-pendirinya>).

Menurut Hanafi (2018) Empat partai baru hadir dengan menawarkan ideologi yang cenderung tidak berbeda, yakni menyatakan diri sebagai partai yang berasas Pancasila, keempat partai berada dalam kelompok partai-partai nasionalis. Menurut Evans (dalam Hanafi, 2018, hal:203) ideologi pada partai di Indonesia sifatnya dinamis dan tidak statis, karena ada gerak pendulum antara ideologi kiri-kanan tergantung pada konteks sosial-politik, dinamika politik dan kepentingan politik.

Persamaan yang terlihat pada partai baru dengan partai lama adalah asas dan ideologi. Keempat partai baru lebih mengarah pada corak nasionalis dan terbuka untuk menerima berbagai kalangan. Dengan itu partai baru akan dihadapkan pada ceruk pemilih yang sama dengan ceruk partai lama atau partai yang sudah mapan terutama yang bercorak nasionalis. Di satu sisi bisa menjadi tantangan, namun disisi lain terbuka prospeknya untuk saling berebut suara. Masuknya partai baru dalam kompetisi pemilu membuat ruang persaingan menjadi ketat karena mereka akan saling berebut pasar pemilih. Partai baru pada pemilu akan berhadapan dengan partai lama yang cenderung sudah bisa mempertahankan eksistensinya di pemilu dengan dibuktikan melalui keberhasilan mereka meraih kursi di parlemen (Hanafi, 2018).

Menurut Hanafi (2018) dengan sketsa kebaruan wajah yang mencoba berdiri sebagai antitesis terhadap partai yang ada. Kehadiran ini bisa menutup kelemahan partai lama dengan memunculkan harapan baru. Salah satu kemungkinan yang terbuka adalah kelompok rasional yang lebih identik dengan kelas menengah kota, karena merekalah yang bisa diduga lebih mempertimbangkan hal-hal seperti kebijakan publik yang ditawarkan. Namun, keefektifan perbedaan kebijakan sosial dan ekonomis tidak pernah terbukti mampu menjadi andalan merebut konstituen suatu partai.

Dengan tidak terbuktinya keefektifan dari perbedaan kebijakan sosial dan ekonomi, partai politik baru juga dapat melakukan strategi dengan melihat kultur masyarakat setempat. Menurut Aribowo (dalam Leni, 2012, hal:23) Jawa Timur terbagi menjadi beberapa subkultur kebudayaan, khusus pada Probolinggo masuk pada budaya pendalungan. Subkultur Pendalungan ini semuanya dipengaruhi oleh Madura Islam. Subkultur ini juga banyak dijumpai di pesisir pantai Jawa sebelah timur, seperti, Pasuruan, Situbondo, dan Jember.

Masyarakat Jawa Timur dikenal dengan karakter budayanya yang terbuka, ekspresif, artikulasi dan menyatakan apa adanya tanpa *tedheng aling-aling* (ditutup-tutupi). Menurut aribowo (dalam Leni, 2012, hal:25), masyarakat Jawa Timur kontemporer juga sering merespon peristiwa-peristiwa politik melalui sikap budaya. Relasi budaya lokal dengan demokrasi menunjukkan dengan jelas tiga karakteristik yang berbeda. Salah satunya wilayah Tapal Kuda yang masyarakatnya lebih agamis.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, ternyata telah banyak penelitian yang dilakukan tentang partai politik di era reformasi saat ini, namun penelitian yang berkaitan dengan strategi partai politik baru dalam menjaring dukungan masyarakat masih belum banyak dilakukan.

Karena itu, pokok permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana strategi partai politik baru dalam menjaring dukungan masyarakat dari partai politik lama di kota Probolinggo?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian menjadi hal penting dalam sebuah karya ilmiah sekaligus menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, sebagai berikut :

### **1. Tujuan Umum**

- a. Untuk mengetahui strategi partai politik baru dalam menjaring dukungan masyarakat.
- b. Untuk menjelaskan kontradiksi teori dan hasil penelitian apa yang ada dalam temuan dilapangan dan bagaimana seharusnya.



## **2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah penelitian antara lain sebagai berikut:

“Untuk mengetahui bagaimana strategi partai politik baru, dalam menjaring dukungan masyarakat dari partai politik lama di kota Probolinggo”.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui pada dasarnya manfaat penelitian adalah untuk mengetahui strategi partai politik baru dalam menjaring dukungan masyarakat di kota Probolinggo.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menjembatani penelitian terdahulu, seputar strategi partai politik dalam menjaring dukungan masyarakat.
- b. Untuk lebih menjelaskan mengenai strategi partai politik baru yang digunakan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan atau pengembangan mengenai strategi dalam menjaring dukungan masyarakat bagi partai politik.

- b. Menghasilkan model penjelasan yang bermanfaat untuk saat menjelaskan variabel yang diteliti.

## **E. Sistematika Penulisan**

Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang sebagai uraian tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi partai politik baru dalam menjaring dukungan masyarakat di kota Probolinggo.

Bab 2 kajian pustaka menguraikan tentang penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir, mengenai strategi partai politik baru dalam menjaring dukungan masyarakat di kota Probolinggo.

Bab 3 metode penelitian membahas tentang metode penelitian sebagai acuan bagaimana mendapatkan data-data strategi partai politik baru dalam menjaring dukungan masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Bab 4 hasil dan pembahasan berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, fokus penelitian, analisis dan interpretasi data.

Bab 5 penutup, kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah yang dijawab.